

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu fenomena globalisasi dan tuntutan reformasi yang terus meningkat, kebutuhan akan peran ekonomi termasuk adanya sektor publik yang disertai tuntutan demokratisasi. Secara umum pemahaman demokratisasi dalam pendapat para ahli adalah jalan pendemokrasian para rakyat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung(Khafida, 2023).

Dalam beberapa waktu belakangan saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar mendorong kebijakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan adanya langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan juga transparan. Khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti pengurangan atau pemangkasan anggaran pada instansi pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada awal tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk mengubah cara pemerintah mengelola anggaran negara. Dengan adanya tujuan instruksi ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam semua keseluruhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran mereka. Dalam hal ini

termasuk pemangkasan anggaran hingga 90 persen untuk belanjaan tertentu (Siregar, 2025).

Kebijakan efisiensi yang menjadi perhatian publik setelah sejumlah kebijakan menjadi fokus utama di masyarakat serta menjadi sorotan di media massa yang menimbulkan pro dan kontra, terutama saat efisiensi dianggap berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Dari sudut pandang lain, kebijakan efisiensi ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mengatasi pemborosan serta menghasilkan output yang sesuai target.

Dalam pandangan islam efisiensi tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pemborosan atau pemangkasan biaya semata, tetapi juga mencakup keberlanjutan, keadilan sosial, dan dampak terhadap kesejahteraan umat.(Rifaudin, M.Pd, 2025) Terdapat didalam Al-Qur'an dengan tegas melarang pemborosan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan anggaran pemborosan tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27 tentang menggunakan harta dengan bijak,

وَاتَّدِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِنِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُثْدِرْ تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا لِخُونَ الشَّيْطَنِينَ وَكَانَ

الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ﴿٢٧﴾

Yang artinya: “*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-*

orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada TuhanYa”.

Dalam konteks ayat tersebut pengelolaan anggaran, kebijakan efisiensi harus menghindari pemborosan, baik dalam anggaran negara maupun anggaran pribadi. Pengelolaan dana yang boros hanya akan mengarah pada kerugian, sementara anggaran yang digunakan secara bijak dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Pengelolaan keuangan harus dioptimalkan kembali untuk menjadi yang lebih baik jika pengelolaan keuangan tidak efisien dan efektif. Maka dari itu, anggaran sangat penting bagi Instansi dalam memperkirakan pencapaian transportasi publik yang diharapkan.

Salah satu sektor penting yang sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang baik adalah transportasi publik. Di mana sekarang Kota Banjarbaru, keberadaan layanan Trans Banjarbaru yang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan moda transportasi yang aman, terjangkau, dan nyaman bagi masyarakat. Namun demikian, untuk menjaga kualitas layanan tersebut, dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru bertanggung jawab dalam mengelola transportasi publik agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Namun, tanpa perencanaan dan pengelolaan yang tepat, potensi pemborosan anggaran dan ketimpangan akses transportasi dapat terjadi, yang dimana pada

akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah apabila tidak secara efektif dan efisien dalam pengelolaannya(Khafida, 2023)

Dampak efisiensi anggaran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan transportasi publik akan lebih fokus pada Kebijakan Anggaran yang disusun setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja memulai Laporan Anggaran berfokus pada hasil atau output yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan membandingkan setiap rencana yang telah ditetapkan tanpa membandingkan hasil akhir.

Pada priode tahun anggaran 2022-2024, Dinas Perhubungan mengajukan berbagai program terencana untuk meningkatkan kulitas pelayanan terhadap masyarakat serta dalam mencapai pengelolaan publik yang berkelanjutan. Namun, dalam pencapaian tujuan tersebut menjadi penting untuk melakukan analisis terhadap efisiensi anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam pengelolaan transporatasi publik selama priode tersebut. Maka dari itu, dari laporan Realisasi Anggaran ini akan menjadi alat penting bagi instansi dalam berkomunikasi mengenai tujuan yang telah diperoleh dari hasil dan proses pencapaian tersebut.

Berikut adalah perkembangan anggaran dan realisasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selama periode 2022-2024.

Tabel 1. 1 Tabel III.21. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran
2022	5.680.190.100	3.606.456.620
2023	5.690.098.900	4.053.036.650
2024	8.276.757.600	7.324.057.227

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Data diolah 2025

Tabel 1.1 di atas melihatkan realisasi serta anggaran Dinas Perhubungan selama 3 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam kurun waktu 3 tahun dalam periode terjadi realisasi yang tidak memenuhi target. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan transportasi publik yang baik. Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tambahan yang bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam mendukung upaya perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang, sehingga pengelolaan transportasi publik dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berkualitas.

Tantangan dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi isu yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan sistem transportasi yang efisien dan merata. Jika tidak ditangani dengan baik, ketidakefisienan anggaran dapat

berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan transportasi publik, seperti keterbatasan sarana prasarana publik, armada, jadwal operasi yang tidak maksimal, atau penurunan kepuasan pengguna.

Transportasi publik merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, efisiensi dalam pengelolaan transportasi publik yang menjadi faktor kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan alokasi anggaran berupaya meningkatkan infrastruktur dan layanan transportasi agar lebih efektif dan inklusif (meluas secara umum) (Salsabila & Syam, 2024)

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan oleh Dinas Perhubungan, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan layanan yaitu Trans Banjarbaru sebagai transportasi publik utama di Kota Banjarbaru.

Pada tingkat daerah, setiap kota menghadapi tantangan spesifik dalam mengelola anggaran transportasi publik. Sebagaimana di Kota Banjarbaru, yang sebagai ibu kota pada Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki kebutuhan transportasi yaitu Trans Banjarbaru yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Transportasi publik Trans Banjarbaru adalah angkutan pengumpulan yang dirancang untuk menghubungkan rute-rute yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 1 September 2024. Angkutan pengumpulan tersebut menerapkan

mekanisme subsidi *BTS (Buy The Service)* yang diselenggarakan pemerintah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah. Bekerjasama dengan operator PT.Bagong Dekaka Makmur dan memiliki 7 koridor serta menerapkan bebas tarif selama Uji Coba(Farazela, 2024).

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah dan temuan penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Terhadap Pengelolaan Transportasi Publik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam **“Dampak Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Terhadap Pengelolaan Transportasi Publik”**, yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Dinas Perhubungan dalam transportasi publik di Kota Banjarbaru?
2. Apa dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan transportasi publik di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka pada penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Dinas Perhubungan dalam transportasi publik di Kota Banjarbaru.

2. Mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan transportasi publik di Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan ini mampu memberikan pemahaman mengenai data yang diperoleh melalui dampak efisiensi anggaran transportasi publik, maka dapat sehingga dimanfaatkan dalam perencanaan transportasi akan lebih efektif dan berkelanjutan. Serta berkaitan dalam kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi islam seperti *maslahah* (kemanfaatan umum), keadilan, dan *hisbah* (pengawasan).
2. Secara praktis, penelitian ini berkaitan dengan manfaat langsung yang dapat diperoleh oleh pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi anggaran yang lebih efektif, dan membantu sektor ekonomi dalam memahami dampak dari efisiensi anggaran transportasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi permasalahan serta judul yang akan diteliti, maka sangat diperlukan batasan-batasan istilah yang digunakan:

1. Dampak menurut para ahli adalah suatu perubahan yang terjadi pada salah satu objek atau kondisi akibat dari suatu tindakan atau peristiwa. Dampak ini juga dapat bersifat positif atau juga negatif, tergantung pada sifat tindakan atau peristiwa yang menjadikan akibatnya(Bizlabco, 2025). Dampak ini pula bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Irfan Islamy dalam situs web (Daniel, 2019) “dampak adalah sebuah akibat atau konsekuensi yang disebabkan karena pelaksanaan dari kebijakan”.
2. Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana sesuatu dilakukan dan kemampuan terhadap melakukan suatu tugas secara tepat dan efisien tanpa membuang uang, waktu dan tenaga. Menurut pandangan islam sebagai contoh, nabi Muhammad telah memperlihatkan kewibawaannya yang tinggi dengan menekankan pada *ihsan* (kemurahan hati) dan *itqan* (kesempurnaan), maka bisa disimpulkan efisiensi menurut islam adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat(Cholik, 2013).
3. Anggaran adalah suatu rencana keuangan sebuah organisasi bisnis ataupun institusi pemerintahan yang akan menjadi sebuah tolak ukur dalam suatu kemajuan pelaksanaan terhadap organisasi bisnis atau instansi pemerintahan. Anggaran yang berjalan baik dan terstruktur akan menjadikan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintahan

akan dapat berjalan dengan lancar dan baik(Dwifarchan & Sulistyanti, 2023), apabila suatu anggaran tersebut berjalan secara efisien dan efektif maka pencapaian yang hendak dicapai dapat terlaksanakan ataupun terpenuhi.

4. Transportasi Publik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi merupakan pengangkutan barang atau orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan atau pengantaran manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Fungsi utama transportasi adalah untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan sosial. Transportasi publik atau transportasi umum adalah sarana yang digunakan ketika seseorang bepergian tanpa kendaraan pribadi, yang meliputi kereta api, bus, taksi, feri, hingga layanan maskapai penerbangan. Angkutan umum ini berperan penting dalam memindahkan orang maupun barang secara efisien dari suatu lokasi ke lokasi lain. Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat menjangkau tempat yang diinginkan serta mendukung kelancaran distribusi barang dari titik asal menuju tujuan(Wahyuni & Mudjanarko, 2020).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini maka terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan berbagai susunan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan informasi latar belakang tentang masalah tersebut, menjelaskan alasan di balik judul penelitian, dan memberikan ringkasan dan penjelasan tentang masalah yang sedang diselidiki. Mencari tahu apa yang dirumuskan dalam perumusan masalah adalah tujuan dari penelitian, yang akan berbentuk perumusan masalah. Definisi operasional mencantumkan istilah-istilah yang membutuhkan definisi yang tepat, dan relevansi penelitian menjelaskan bagaimana temuan studi ilmiah dapat digunakan untuk keuntungan teoritis dan praktis dalam jenis studi ini.

2. BAB II Landasan Teori

Bagian ini menguraikan alur pemikiran penelitian, termasuk asumsi-asumsi yang digunakan serta landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis subjek dan objek penelitian yaitu Pada Teori Efisiensi Anggaran, Dasar Hukum Kebijakan Efisiensi, Transportasi Publik, dan Dampak.

3. BAB III Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, subjek serta objek penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai “Dampak Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Terhadap Pengelolaan Transportasi Publik ”.

5. BAB V Penutup

Bab V memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta menyajikan saran-saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian.